

Editor: Khusnul Hatimah, S.Pd., M.A.P.



DIGITALISASI BIROKRASI



DAN

PELAYANAN PUBLIK



Dr. Sutrisman Basir, S.Sos., M.I.Kom.
Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.
Darwis, S.E., M.A.P.
Muhammad Hidayat L, S.Pd., M.Pd.
Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P.

DIGITALISASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Dr. Sutrisman Basir, S.Sos., M.I.Kom.
Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.
Darwis, S.E., M.A.P.
Muhammad Hidayat L, S.Pd., M.Pd.
Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

DIGITALISASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK

Penulis:

Dr. Sutrisman Basir, S.Sos., M.I.Kom.
Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.
Darwis, S.E., M.A.P.
Muhammad Hidayat L, S.Pd., M.Pd.
Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Khusnul Hatimah, S. Pd., M.A.P.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

ix, 164, uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-634-262-292-6

Cetakan Pertama:

September 2026

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2026 by Tahta Media Group

All Right Reserved

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

Perumahan Mitra Utama Residence 3 Blok A no 1, Sawahan, Tempel,
Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557

email: tahtaliterasimedia@gmail.com

website: <http://store.tahtamedia.co.id/>

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul Digitalisasi Birokrasi dan Pelayanan Publik dapat diselesaikan dengan baik. Perkembangan zaman menuntut organisasi/instansi untuk menerapkan proses digitalisasi dan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat untuk meningkatkan kepuasan good governance. Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik melalui proses digitalisasi agar pemenuhan kebutuhan akan pelayanan itu diperoleh dengan efektif dan efisien oleh masyarakat sehingga berpengaruh pula pada tingkat kepuasan terhadap pemerintah.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman materi secara teoritis dan praktis mengenai konsepsi dasar digital governance, transformasi pelayanan, kepemimpinan, kelembagaan, akuntabilitas anggaran, teknologi informasi, peran Artificial Intelligence (AI), bisnis layanan publik hingga kewirausahaan dan digital sektor publik. Semoga buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran dan pengembangan ilmu dan pengetahuan yang inovatif.

Makassar, Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DASAR GOVERNANSI DIGITAL DALAM	
ADMINISTRASI PUBLIK MODERN.....	1
Dr. Sutrisman Basir, S.Sos., M.I.Kom.....	1
Universitas Negeri Makassar	1
A. Pendahuluan	1
B. Governansi Digital dalam Konteks Administrasi Publik	3
C. Prinsip-Prinsip Governansi Digital.....	4
D. Ruang Lingkup Governansi Digital.....	8
E. Urgensi Governansi Digital dalam Administrasi Publik	
Modern.....	11
F. Kesimpulan.....	13
Daftar Pustaka.....	14
Profil Penulis	16
BAB 2 TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS	
GOVERNANSI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK	
MODERN.....	17
Dr. Sutrisman Basir, S. Sos., M.I.Kom.....	17
Universitas Negeri Makassar	17
A. Pendahuluan	17
B. Transformasi Pelayanan Publik dalam Administrasi Publik .	18
C. Governansi Digital Sebagai Kerangka Transformasi Pelayanan	
Publik	20
D. Model Konseptual Transformasi Pelayanan Publik Berbasis	
Governansi Digital.....	21
E. Dari Pelayanan Konvensional Menuju Pelayanan Digital	25

F. Responsivitas dalam Pelayanan Publik Digital.....	26
G. Tantangan Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Governansi Digital.....	28
H. Penutup.....	29
Daftar Pustaka.....	31
Profil Penulis	33
BAB 3 KELEMBAGAAN, REGULASI, DAN KEPEMIMPINAN DALAM GOVERNANSI DIGITAL	34
Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.....	34
Universitas Negeri Makassar	34
A. Pendahuluan	34
B. Reformasi Birokrasi: Konsep dan Perkembangan	36
C. Tata Kelola Pemerintahan Digital (<i>Digital Governance</i>)	39
D. Tantangan dan Strategi Penguatan Pemerintahan Digital.....	42
E. Masa Depan Reformasi Birokrasi Digital.....	44
Daftar Pustaka.....	47
Profil Penulis	49
BAB 4 KELEMBAGAAN, REGULASI, DAN KEPEMIMPINAN DALAM GOVERNANSI DIGITAL	50
Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.....	50
Universitas Negeri Makassar	50
A. Pendahuluan	50
B. Konsep dan Perkembangan Governansi Digital.....	52
C. Kelembagaan dalam Governansi Digital	55
D. Regulasi dalam Governansi Digital	58
E. Kepemimpinan dalam Governansi Digital.....	61
F. Integrasi Kelembagaan, Regulasi, dan Kepemimpinan dalam Ekosistem Governansi Digital	63
Daftar Pustaka.....	65
Profil Penulis	67

BAB 5 DIGITALISASI KEUANGAN PUBLIK DAN	
TRANSPARANSI FISKAL	68
Darwis, S.E., M.A.P	68
Universitas Negeri Makassar	68
A. Pendahuluan	68
B. Konsep Digitalisasi Keuangan Publik	69
C. Teknologi Pendukung	70
D. Transparansi Fiskal	75
E. Implementasi di Indonesia	77
F. Tantangan	79
Daftar Pustaka	82
Profil Penulis	88
BAB 6 AKUNTABILITAS ANGGARAN DAN PENGAWASAN	
KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL	89
Darwis, S.E., M.A.P	89
Universitas Negeri Makassar	89
A. Pendahuluan	89
B. Konsep Dasar Akuntabilitas Anggaran Publik	90
C. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Anggaran	91
D. Siklus Anggaran Pemerintah dan Akuntabilitas	93
E. Transformasi Digital dalam Akuntabilitas Anggaran	94
F. Teknologi Digital dalam Pengawasan Keuangan Publik	96
G. Tantangan Pengawasan Keuangan Digital	98
Daftar Pustaka	100
Profil Penulis	104

BAB 7 INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DALAM GOVERNANSI DIGITAL	105
Muhammad Hidayat L, S.Pd., M.Pd.	105
Universitas Negeri Makassar	105
A. Konsep Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Governansi Digital.....	105
B. Komponen Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintahan	107
C. Interoperabilitas Sistem dan Integrasi Data Antarinstansi...	110
D. Keamanan Siber dalam Infrastruktur Pemerintahan Digital.....	112
E. Tantangan dan Strategi Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintahan.....	114
Daftar Pustaka.....	116
Profil Penulis	118
BAB 8 BIG DATA, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, DAN KEAMANAN DATA DALAM PEMERINTAHAN DIGITAL	119
Muhammad Hidayat L., S.Pd., M.Pd.	119
Universitas Negeri Makassar	119
A. Konsep Big Data dan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Pemerintahan Digital.....	119
B. Pemanfaatan Big Data untuk Pengambilan Keputusan dan Pelayanan Publik	122
C. <i>Artificial Intelligence</i> dan <i>Machine Learning</i> dalam Inovasi Layanan Pemerintahan	123
D. Dashboard Kebijakan dan Analitik Data dalam Tata Kelola Pemerintahan	125
E. Perlindungan Data Pribadi dan Etika Teknologi dalam Governansi Digital.....	127
Daftar Pustaka.....	130

Profil Penulis	132
BAB 9 MODEL BISNIS LAYANAN PUBLIK DIGITAL DAN PUBLIC VALUE CREATION	133
Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P	133
Universitas Negeri Makassar	133
A. Pendahuluan	133
B. Inovasi Model Bisnis Sektor Publik	134
C. Public Value Creation.....	136
D. Efisiensi Layanan Publik	138
E. Kemitraan Publik–Swasta (<i>Public–Private Partnership</i>)	140
F. Keberlanjutan Layanan Digital.....	142
G. Penutup	144
Daftar Pustaka.....	146
Profil Penulis	148
BAB 10 INOVASI, KEWIRAUSAHAAN PUBLIK, DAN EKOSISTEM DIGITAL SEKTOR PUBLIK.....	149
Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P	149
Universitas Negeri Makassar	149
A. Pendahuluan	149
B. Inovasi dalam Sektor Publik	150
C. <i>Public Entrepreneurship</i> (Kewirausahaan Publik).....	152
D. <i>Startup GovTech</i> dalam Transformasi Layanan Publik.....	154
E. Kolaborasi Ekosistem Digital Sektor Publik.....	156
F. Strategi Pengembangan Layanan Publik Berbasis Nilai	158
G. Penutup	160
Daftar Pustaka.....	162
Profil Penulis	164

BAB 1

KONSEP DASAR GOVERNANSI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK MODERN

Dr. Sutrisman Basir, S.Sos., M.I.Kom.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah menjadi salah satu perubahan paling penting dalam penyelenggaraan administrasi publik modern. Pemerintah di berbagai negara tidak lagi hanya dituntut untuk menyediakan layanan publik secara administratif, tetapi juga harus mampu menghadirkan layanan yang cepat, transparan, terintegrasi, responsif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perubahan ini menandai pergeseran dari model birokrasi konvensional menuju tata kelola pemerintahan yang semakin berbasis teknologi, data, jaringan, dan partisipasi publik.

Dalam konteks global, transformasi digital pemerintahan tercermin dari meningkatnya perhatian *terhadap e-government, digital government, open government, data governance, dan GovTech*. *United Nations E-Government Survey 2024* menunjukkan bahwa rata-rata *global E-Government Development Index* mengalami peningkatan dari 0,6102 pada 2022 menjadi 0,6382 pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia terus memperkuat kapasitas digital pemerintahan melalui layanan daring, infrastruktur telekomunikasi,

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024*. Jakarta: BPS.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Meijer, A., & Bolívar, M. P. R. (2016). Governing the smart city: A review of the literature on smart urban governance. *International Review of Administrative Sciences*, 82(2), 392–408.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Sutrisman Basir. (2023). *Konsep dan Implementasi E-Governance*. Yogyakarta: Bintang Madani.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). *United Nations E-Government Survey 2024*. New York: United Nations.

World Bank. (2025). *GovTech Maturity Index 2025: Tracking public sector digital transformation worldwide*. Washington, DC: World Bank.

PROFIL PENULIS



Dr. Sutrisman Basir, S.Sos., M.I.Kom. Penulis lahir di Sengkang, 16 Februari 1988. Menyelesaikan studi S-1 pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada tahun 2010 dan meraih gelar magister pada tahun 2012 pada program studi S-2 Ilmu Komunikasi Universitas Satria Makassar. Tahun 2022 telah menyelesaikan program doktor pada Program Studi Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar (UNM). Saat ini, penulis adalah dosen PNS Universitas Negeri Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, prodi Administarsi Negara. Beberapa karya ilmiah telah dipublikasikan oleh penulis, di antaranya telah terbit di jurnal internasional bereputasi terkait studi inovasi aplikasi elektronik. Daftar karya ilmiah dapat di telusuri pada SINTA ID: 6657450

BAB 2

TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS GOVERNANSI DIGITAL DALAM ADMINISTRASI PUBLIK MODERN

Dr. Sutrisman Basir, S. Sos., M.I.Kom.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Transformasi pelayanan publik merupakan salah satu isu sentral dalam perkembangan administrasi publik modern. Dalam beberapa dekade terakhir, penyelenggaraan pelayanan publik tidak lagi hanya dipahami sebagai aktivitas administratif yang dilakukan melalui loket, dokumen fisik, antrean manual, dan prosedur birokratis yang kaku. Perubahan sosial, perkembangan teknologi informasi, meningkatnya tuntutan masyarakat, serta kebutuhan akan pemerintahan yang lebih responsif telah mendorong negara untuk mengubah model pelayanan publik menuju sistem yang lebih digital, terbuka, cepat, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks global, transformasi digital pemerintahan telah menjadi agenda penting bagi banyak negara. Laporan **United Nations E-Government Survey 2024** menempatkan Indonesia pada peringkat 64 dari 193 negara dalam pengembangan e-government, naik dari peringkat 77 pada tahun 2022. Capaian ini menunjukkan adanya

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2024*. BPS.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). Digital-era governance: IT corporations, the state, and e-government. *Oxford University Press*.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and managing eGovernment: An international text*. SAGE Publications.
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). *Indonesia naik 13 peringkat pada UN E-Government Survey 2024*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2025). *Indeks SPBE Nasional meningkat: Penguatan integrasi pelayanan publik berbasis digital*.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4).
- Ombudsman Republik Indonesia. (2025). *Laporan Tahunan Ombudsman RI 2024*.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.

Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic: Are public service organizations capable of co-production and value co-creation? *Public Management Review*.

Sutrisman Basir. (2023). *Konsep dan Implementasi E-Governance*. Yogyakarta. Bintang Madani

United Nations. (2024). *United Nations E-Government Survey 2024*.

World Bank. (2022). *GovTech Maturity Index: The State of Public Sector Digital Transformation*. World Bank.

PROFIL PENULIS



Dr. Sutrisman Basir, S.Sos., M.I.Kom. Lahir di Sengkang, 16 Februari 1988. Menyelesaikan studi S-1 pada Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar pada tahun 2010 dan meraih gelar magister pada tahun 2012 pada program studi S-2 Ilmu Komunikasi Universitas Satria Makassar. Tahun 2022 telah menyelesaikan program doktor pada Program Studi Administrasi Publik di Universitas Negeri Makassar (UNM). Saat ini, penulis adalah dosen PNS Universitas Negeri Makassar di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, prodi Administarsi Negara. Beberapa karya ilmiah telah dipublikasikan oleh penulis, di antaranya telah terbit di jurnal internasional bereputasi terkait studi inovasi aplikasi elektronik. Daftar karya ilmiah dapat ditelusuri pada SINTA ID: 6657450

BAB 3

KELEMBAGAAN, REGULASI, DAN KEPEMIMPINAN DALAM GOVERNANSI DIGITAL

Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi telah mengubah cara pemerintah menyelenggarakan administrasi publik. Birokrasi yang sebelumnya berorientasi pada hierarki, prosedur, dan pengendalian administratif kini dituntut menjadi lebih adaptif, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, administrasi publik tidak lagi sekadar menjalankan regulasi, tetapi juga dituntut mampu menciptakan tata kelola yang efektif di tengah kompleksitas persoalan pemerintahan.

Kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan semakin meningkat karena setiap kebijakan melibatkan banyak lembaga, kepentingan, dan proses koordinasi. Struktur birokrasi yang panjang sering kali memperlambat pengambilan keputusan dan mengurangi efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, transformasi menuju pemerintahan digital tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi, tetapi juga penguatan kelembagaan, regulasi, kepemimpinan,

DAFTAR PUSTAKA

- Adie, B. U., Tate, M., & Valentine, E. (2024). Digital leadership in the public sector: A scoping review and outlook. *International Review of Public Administration*, 29, 42–58.
- Djarmiko, G. H., Sinaga, O., & Pawirosumarto, S. (2025). Digital transformation and social inclusion in public services: A qualitative analysis of e-government adoption for marginalized communities in sustainable governance. *Sustainability*.
- Fardiah, D., Darmawan, F., Rinawati, R., Supaat, V. E. M., & Hadnansyah, E. (2024). Digital transformation through electronic-based government system performance as public relations strategy. *PRofesi Humas*.
- Haning, M. T. (2019). Reformasi birokrasi di Indonesia: Tinjauan dari perspektif administrasi publik. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*.
- Jabar, S., & Frinaldi, A. (2025). Dari birokrasi ke birokrasi inovatif: Peran transformasi budaya institusional. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(2).
- Lu, Y. C. (2024). Impact of digital technologies on organizational change strategies: A review. *Research Journal in Business and Economics*.
- Maulana, R. Y., & Firmansyah, A. (2023). Collaborative approach on digital government transformation in West Java. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*.
- Pribadi, U., Iqbal, M., Ibrahim, M., Juhari, & Ahdarrijal, Y. (2024). Nexus of public organization, transparency, and accountability in Indonesia's digital governance. *Journal of Public Affairs*.

- Rahmat, B., Hartanto, B., & Hilman, A. (2024). Bureaucratic reform in Indonesia: From “public administration” to “public management”.
- Shabihah, S. A., Ryanindityo, M., & Nurkumalawati, I. (2025). Peran e-governance sebagai instrumen peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia. *Journal of Administration and International Development*.
- Sugiyanto, H. (2025). Evolution of public sector leadership in the era of digital transformation. *International Journal of Public Administration and Policy*.
- Van Rooy, D. (2024). Human-machine collaboration for enhanced decision-making in governance. *Data & Policy*, 6.
- Wahyurudhanto, A. (2020). Critical reorientation of bureaucratic reform and good governance in public sector administration in Indonesia.
- Wijayanti, A. D., Augustinah, F., & Ferriswara, D. (2025). The role of bureaucratic reform in enhancing public service quality: Evidence from East Java. *Journal of Governance and Public Administration*.

PROFIL PENULIS



Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Sebagai akademisi di bidang administrasi publik, penulis aktif menjalankan tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus kajian akademik penulis meliputi reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, inovasi pelayanan publik, *collaborative governance*, serta transformasi digital sektor publik. Selain melaksanakan kegiatan pengajaran, penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi akademik, seminar, pelatihan, dan forum ilmiah untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Penulis aktif menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan pada berbagai jurnal nasional maupun internasional, serta berkontribusi dalam pengembangan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal akademik dan pendampingan penulisan karya ilmiah mahasiswa. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah sebagai pemakalah serta berpartisipasi dalam forum akademik yang berkaitan dengan pengembangan ilmu administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui aktivitas akademiknya, penulis berkomitmen untuk mendukung pengembangan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan sosial maupun perkembangan teknologi. Email: andirahmatnizarhidayat@unm.ac.id

BAB 4

KELEMBAGAAN, REGULASI, DAN KEPEMIMPINAN DALAM GOVERNANSI DIGITAL

Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara pemerintah menyelenggarakan administrasi, memberikan pelayanan publik, dan berinteraksi dengan masyarakat. Teknologi tidak lagi diposisikan sebagai alat pendukung birokrasi, tetapi telah menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan. Pemanfaatan sistem digital, integrasi data, layanan berbasis elektronik, hingga penggunaan teknologi cerdas menunjukkan bahwa administrasi publik bergerak menuju pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan berbasis data.

Perkembangan tersebut mendorong pergeseran dari konsep *electronic government* menuju *digital governance*. Jika *e-government* berfokus pada digitalisasi layanan administrasi, *digital governance* menempatkan teknologi sebagai bagian dari transformasi organisasi, proses pengambilan keputusan, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya mengubah

DAFTAR PUSTAKA

- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494.
- Fountain, J. E. (2001). *Building the virtual state: Information technology and institutional change*. Brookings Institution Press.
- Gil-Garcia, J. R., Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2018). Digital government and public management research: Finding the crossroads. *Public Management Review*, 20(5), 633–646.
- Janowski, T. (2015). Digital government evolution: From transformation to contextualization. *Government Information Quarterly*, 32(3), 221–236.
- Kane, G. C., Phillips, A. N., Copulsky, J., & Andrus, G. (2019). *The technology fallacy: How people are the real key to digital transformation*. MIT Press.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance networks in the public sector*. Routledge.
- Kuner, C., Cate, F. H., Millard, C., Svantesson, D. J. B., & Lynskey, O. (2017). The challenge of big data for data protection. *International Data Privacy Law*, 7(2), 1–3.
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Publishing.

Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading digital: Turning technology into business transformation*. Harvard Business Review Press.

PROFIL PENULIS



Andi Rahmat Nizar Hidayat, S.I.P., M.Si.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Sebagai akademisi di bidang administrasi publik, penulis aktif menjalankan tridharma perguruan tinggi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus kajian akademik penulis meliputi reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, inovasi pelayanan publik, *collaborative governance*, serta transformasi digital sektor publik. Selain melaksanakan kegiatan pengajaran, penulis juga aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi akademik, seminar, pelatihan, dan forum ilmiah untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat. Penulis aktif menghasilkan karya ilmiah yang diterbitkan pada berbagai jurnal nasional maupun internasional, serta berkontribusi dalam pengembangan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal akademik dan pendampingan penulisan karya ilmiah mahasiswa. Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah sebagai pemakalah serta berpartisipasi dalam forum akademik yang berkaitan dengan pengembangan ilmu administrasi publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui aktivitas akademiknya, penulis berkomitmen untuk mendukung pengembangan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan sosial maupun perkembangan teknologi. Email: andirahmatnizarhidayat@unm.ac.id

BAB 5

DIGITALISASI KEUANGAN PUBLIK DAN TRANSPARANSI FISKAL

Darwis, S.E., M.A.P

Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Keuangan publik merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas bagaimana pemerintah memperoleh, mengalokasikan, dan mempertanggungjawabkan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi tata kelola keuangan publik menuju sistem yang lebih efisien, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Transformasi ini secara signifikan mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran serta mempercepat proses administrasi keuangan melalui pemanfaatan *big data* dan sistem pelaporan elektronik (Suryanto & Dai, 2025).

Keuangan publik mencakup mekanisme pengelolaan sumber daya negara yang krusial untuk menjamin stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Transformasi digital dalam sektor ini kini menjadi pendorong utama inovasi untuk mencapai tata kelola fiskal yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan. Digitalisasi keuangan publik bukan sekadar penggunaan aplikasi komputer, tetapi perubahan menyeluruh terhadap proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. Y. A. B., Abusaimh, H., Rababah, A., Alqsass, M., Al-Olima, N. H., & Hamdan, M. N. (2023). Assessment of effects in advances of accounting technologies on quality financial reports in Jordanian public sector. *Uncertain Supply Chain Management*, 12(1), 133–142. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2023.10.011>
- Anwar, A. I., & Hadi, M. (2022). Implementasi Aplikasi Sakti Dan Span Dalam Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Informatika*, 1(2), 32–55. <https://doi.org/10.57094/ji.v1i2.359>
- Arbani, T. S., & Indriyani, W. (2025). Penerapan Blockchain Guna Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(1), 18–32. <https://doi.org/10.56655/jid.v4i1.333>
- Ardyanto, D., Subagja, I. K., & Hakim, A. (2025). Implementasi Sistem Keuangan Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Pertahanan Melalui Aplikasi Sakti. *Journal of Accounting and Finance Management*, 6(5), 2773–2780. <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i5.2829>
- Azhara, A., Rahmadi, F. D., Pilihan, M. R., Syahrofi, M. T., Abdilla, N., Maritza, N. A., & Fatimatuszahro, S. (2025). Analisis Kebocoran Data NPWP dalam Sistem e-Government: Tinjauan Keamanan Informasi dan Kepercayaan Publik. *QISTINA Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 4(1), 981–996. <https://doi.org/10.57235/qistina.v4i1.6390>

- Daniel, Y., Astari, T. N., Putri, M. A., Bilqisti, H., & Ariesmansyah, A. (2025). Transformasi Digital Dinas Perpajakan Kota Bandung: Meningkatkan Tata Kelola, Kebijakan Publik, dan Keuangan Daerah Melalui Digitalisasi Administrasi Publik. *SMASH Journal of Social Management Sains and Health*, 2(1), 35–42. <https://doi.org/10.57235/smash.v2i1.5166>
- Dwinanda, F. R., Muharam, R. S., Miftah, A. Z., Firmansyah, A., & Komara, S. R. (2023). Dampak Inovasi Teknologi Keuangan Publik Terhadap Akuntabilitas Dan Transparansi: Sebuah Kajian Literatur. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan Publik)* 5(2). <https://doi.org/10.30743/jekkp.v5i2.8563>
- Hanif, S. K., Sihombing, L. V. F., Pakpahan, Y., Fajri, M. Y., & Nababan, A. A. (2025). Transparansi Anggaran Publik sebagai Pilar Good Governance pada Pemerintahan Daerah di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14895–14899. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4605>
- Hidayat, M., Defitri, S. Y., & Hilman, H. (2024). The Impact of Artificial Intelligence (AI) on Financial Management. *Management Studies and Business Journal (PRODUCTIVITY)*, 1(1), 123–129. <https://doi.org/10.62207/s298rx18>
- Hutabarat, J. S., Mawartina, J., Yanti, D., & Pangestoeti, W. (2025). Peluang dan Tantangan dalam Efisiensi Anggaran Negara pada Transformasi Digital Pelayanan Publik. *Konstitusi.*, 2(3), 28–40. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i3.752>
- Khodijah, S., Hasanuddin, M. I., & Amin, M. (2025). Penerapan Big Data dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Pemerintahan. *Journal of Data Science and Informatics Engineering*, 1(1), 17–23. <https://doi.org/10.64803/jodsie.v1i1.14>

- Lakat, J. S., Kumenaung, A. G., Lengkong, V. P. K., & Gamaliel, H. (2025). Inovasi Atau Stagnasi? Pengaruh Disrupsi Teknologi Informasi Terhadap Efisiensi Pengelolaan Keuangan Publik Di Sulawesi Utara. *Analisis*, 15(1), 173–192. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5243>
- Lastanti, N., & Djasuli, M. (2024). Optimizing The Use Of Cloud Technology In Public Sector Management Control (Case Study Of E-Government In Bandung City). *Eduvest - Journal Of Universal Studies*, 4(5). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1245>
- Liana, M. (2026). Implementasi Aplikasi Keuangan Pemerintah dalam Penatausahaan Keuangan dan Layanan Administrasi Masyarakat di Kantor Camat Tebas. *Aliansi Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 20(2), 88–96. <https://doi.org/10.46975/4h1eeb08>
- Makatara, B. A. Y., Dida, M. L. N., Utomo, D. D., & Marta, F. Y. D. (2025). Akuntabilitas Anggaran Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan di Era Digital. *RIGGS Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 7976–7981. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.3214>
- Matondang, K. A., Panjaitan, C. T., Ginting, F. H., Sitorus, M. C., & Febina, J. (2025). Analisis Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Untuk Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi. *JLEB Journal of Law Education and Business*, 3(1), 431–435. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5819>
- Novianti, P., & Falah, S. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Ri Terhadap Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah Pada Bpkad Kabupaten Jayapura. *Keuda (Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah)*, 9(3), 359–378. <https://doi.org/10.52062/keuda.v9i3.4371>

- Nur, Muh. (2025). Fiscal Efficiency and Public Service Innovation in the Era of Digitalization of Indonesian Government. *Nomico.*, 2(10), 112–124. <https://doi.org/10.62872/a5r5gh34>
- Pura, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *AkMen JURNAL ILMIAH*, 18(1), 1–13. <https://doi.org/10.37476/akmen.v18i1.1316>
- Purwono, A. Y. (2025). Implementasi Artificial Intelligence pada Praktik Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). *EKOMA Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, 4(3), 5160–5169. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.6903>
- Putri, A., Shesaria, N., & Tauhid, I. (2025). Tantangan Pengelola Keuangan Negara Di Era Digital. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 20(1), 31–35. <https://doi.org/10.52062/jaked.v20i1.4431>
- Rahmadany, A. F. (2024). Transformasi Digital Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Agile government pada Reformasi Birokrasi 4.0. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 16(2), 195–209. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v16i2.4809>
- Rosmayani, R., Arham, A., Syukri, F., Fatimah, F., & Arodhiskara, Y. (2025). Penggunaan Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. *Journal AK-99.*, 5(1), 163–168. <https://doi.org/10.31850/ak99.v5i1.3724>
- Sabrina, C. (2025). Krisis Keamanan Data Publik Dan Urgensi Kedaulatan Data Di Era Governansi Digital. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 15(1). <https://doi.org/10.56196/jta.v15i01.500>

- Sanjaya, N., Dewi, H., Putri, S. S., Putri, S. H., D, A. N., & Rini, M. (2025). Penerapan E-Budgeting Untuk Mendukung Transparansi Anggaran Studi Kasus: Pemerintah Kota Surakarta. *ANTASENA Governance and Innovation Journal*, 3(1), 239–253. <https://doi.org/10.61332/antasena.v3i1.348>
- Sopianti, Y., & Munandar, A. (2024). Penerapan SAKTI dalam Pengelolaan Keuangan pada Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. *INOVASI*, 11(2), 386–398. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i2.p386-398.42092>
- Suryanto, S., & Dai, R. (2025). Digitalisasi Pembayaran Dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Efisiensi Dan Transparansi. *Jurnal Agregasi Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 13(1), 96–110. <https://doi.org/10.34010/hnta2869>
- Suryato, D., & Noch, R. M. (2023). Pengaruh Kompetensi Pegawai, Penerapan IT Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Brainy Jurnal Riset Mahasiswa*, 3(2), 18–27. <https://doi.org/10.23969/brainy.v3i2.64>
- Tahir, M. I. H. M., Martini, A., Gunawan, A. A. N., Makbul, Y., Yossa, N., Wiryanto, W., Fahrudin, M., & Ilya, R. (2025). Can digital transformation improve the transparency and accountability of Indonesian public governance? *International Journal of Data and Network Science*, 9(3), 689–700. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.7.009>
- Tariq, M. U. (2025). Digital Accountability. In *IGI Global eBooks* (pp. 129–154). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9251-5.ch004>
- Uliansyah, B. A. A., Darono, A., & Febrian, F. (2021). Analitika Data Dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Use Case Data Dasar Dana Alokasi Umum. *Teknika*, 10(2), 160–168. <https://doi.org/10.34148/teknika.v10i2.344>

- Utami, P. I. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *PAPATUNG Jurnal Ilmu Administrasi Publik Pemerintahan Dan Politik*, 6(2), 1–9. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i2.726>
- Zainuri, A. (2025). Inovasi Teknologi Dalam Administrasi Keuangan Publik. *Seminar Nasional Penelitian Terapan*, 1, 63–73. <https://doi.org/10.30656/senapentra.v1i.201>

PROFIL PENULIS



Darwis, S.E., M.A.P

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial & Hukum Universitas Negeri Makassar. Penulis lahir di Tamanroya tanggal 05 Maret 1992. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen, Konsentrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar dan melanjutkan S2 Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta. Penulis pernah aktif sebagai tenaga ahli Anggota DPR RI (2018-2024) dalam tugas-tugas pendampingan penyerapan aspirasi, sosialisasi program dan kebijakan di bidang Kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan Komisi IX DPR RI. Saat ini aktif sebagai peneliti dan penulis dalam bidang perencanaan kebijakan dan keuangan publik serta menjalankan tugas sebagai dosen dalam bidang kebijakan publik di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H), Universitas Negeri Makassar (UNM) sejak tahun 2025. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: darwis@unm.ac.id

BAB 6

AKUNTABILITAS ANGGARAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN BERBASIS TEKNOLOGI DIGITAL

Darwis, S.E., M.A.P

Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik telah membuka peluang signifikan untuk memperkuat transparansi melalui platform *e-budgeting* dan akses data terbuka. Integrasi sistem elektronik ini tidak hanya mempercepat proses pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi (Tahir et al., 2025).

Berbagai kajian dan analisis terdahulu telah mengidentifikasi kemampuan solusi penerjemahan dokumen berbasis unggahan dalam mendukung standardisasi audit internasional dengan tetap mempertahankan ketepatan terminologi keuangan yang bersifat penting. Evaluasi ini menjadi sangat relevan mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola sistem akuntansi digital yang sering kali menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah (Handarini et al., 2025).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, R. D. (2025). Pemanfaatan Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam Pengelolaan Keuangan di Ditjen Binwasnaker dan K3: Transformasi Akuntansi Digital. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 5(9), 3000–3009. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i9.32482>
- Arbani, T. S., & Indriyani, W. (2025). Penerapan Blockchain Guna Meningkatkan Akuntabilitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(1), 18–32. <https://doi.org/10.56655/jid.v4i1.333>
- Auditya, L., Husaini, H., & Lismawati, L. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JURNAL FAIRNESS*, 3(1), 21–42. <https://doi.org/10.33369/fairness.v3i1.15274>
- Binsasi, T. A. (2026). Studi Kasus Penggunaan Aplikasi Sistem Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). In *Repository Universitas Katolik Widya Mandira (Universitas Katolik Widya Mandala)*. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Brij, V. K. T. (2025). AI in Financial Reporting and Audit Automation. *Journal of Information Systems Engineering & Management*, 10, 876–885. <https://doi.org/10.52783/jisem.v10i62s.13714>
- Dewi, N. W. D. S., & Suardana, I. K. (2020). Budaya Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3121. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i12.p10>

- Handarini, D., Anugrah, S., Suyono, W. P., & Puspa, E. S. (2025). Akuntansi Keuangan dalam Era Digital: Peran Teknologi Blockchain dan AI dalam Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 19(2), 235–249. <https://doi.org/10.21009/wahana.19.0217>
- Haris, A. (2025). Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang E-Budgeting, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(1), 28–37. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i1.752>
- Imelda, T., Shintia, A., Wati, W., Julana, P. R., & Mariana, M. (2024). Strategi Pengelolaan Keuangan Negara: Implementasi Akuntansi Pemerintahan untuk Efisiensi dan Transparansi. *EKALAYA Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 60–66. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i4.1466>
- Irawati, S., Yunani, A., & Swandari, F. (2025). Accountability and Transparency to Increase the Achievement of Budget Realization Targets. *TEM Journal*, 2243–2258. <https://doi.org/10.18421/tem143-30>
- Kulothungan, V. (2025). A Blockchain-Enabled Approach to Cross-Border Compliance and Trust. In *ArXiv.org*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2501.09182>
- Maulana, N. Y., Kesi, W., Kesi, W., & Dian, I. (2025). Kinerja Anggaran Memediasi Pengaruh Gcg Terhadap Efektifitas Pengelolaan Anggaran (Study Pada Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 92–115. <https://doi.org/10.26623/jreb.v18i1.12682>
- Nasution, M. I., & M.Si, N. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>

- Nisaa, R. K., Bahrim, S. M. S., & Kustiwi, I. A. (2024). Teknologi Digital Dan Transformasi Internal Audit Terhadap Perlakuan Laporan Keuangan : Studi Literatur. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(2), 263–277. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i2.2596>
- Nuraziza, S., & Sudirman, W. F. R. (2024). Keseimbangan Antara Inovasi Teknologi dan Kepatuhan Regulasi: Tantangan dalam Mengintegrasikan Artificial Intelligence (AI) dalam Manajemen Keuangan. *MONEY JOURNAL OF FINANCIAL AND ISLAMIC BANKING*, 2(1), 47–57. <https://doi.org/10.31004/money.v2i1.21438>
- Pertiwi, A. D., Sitanggang, C. J., Sitompul, P. U., Lubis, P. K. S. D., & Matondang, K. A. (2026). Analisis Transparansi Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah Tahun 2024 & 2025. *MANTAP Journal of Management Accounting Tax and Production*, 4(1), 184–192. <https://doi.org/10.57235/mantap.v4i1.8195>
- Qomar, M., & Muhadli, Z. (2023). Pemanfaatan Media Digital Pada Sistem Pemerintahan: Studi Literatur Berbantuan Nvivo 12 Pro. *Jurnal Humanitas Katalisator Perubahan Dan Inovator Pendidikan*, 10(1), 14–28. <https://doi.org/10.29408/jhm.v10i1.23086>
- Rahman, A. Z., & Saputra, F. L. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. *HUMANIKA*, 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2.54277>
- Ramli, N. S. A., & Ali, N. A. M. (2024). Integrating Technology in Government Internal Audit: Catalysts and Challenges. *Information Management and Business Review*, 16, 124–136. [https://doi.org/10.22610/imbr.v16i1\(i\).3668](https://doi.org/10.22610/imbr.v16i1(i).3668)

- Randhona, O. L., & Fitriasuri. (2023). Pengaruh Value For Money, Spi, Kompetensi, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Publik Dalam APBDES. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 16(2), 275–284. <https://doi.org/10.35143/jakb.v16i2.6132>
- Salihi, S. S. (2024). Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efektivitas Audit Internal. *Journal of International Taxation, Accounting and Auditing.*, 3(2), 140–148. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v3i2.1407>
- Setyowati, W., Setiyono, T. A., Gung, G., & Novriyanti, B. (2023). Leveraging Technology in Accounting for Entrepreneurial Insight into Government Budgeting Efficiency. *Aptisi Transactions On Technopreneurship (ATT)*, 5(3), 251–260. <https://doi.org/10.34306/att.v5i3.340>
- Suryani, P. (2021). Pengaruh Partisipasi Publik, Akuntabilitas, Transparansi Dan Integritas Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah. *Jurnal Fairness*, 9(1), 33–44. <https://doi.org/10.33369/fairness.v9i1.15220>
- Tahir, M. I. H. M., Martini, A., Gunawan, A. A. N., Makbul, Y., Yossa, N., Wiryanto, W., Fahrudin, M., & Ilya, R. (2025). Can digital transformation improve the transparency and accountability of Indonesian public governance? *International Journal of Data and Network Science*, 9(3), 689–700. <https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2024.7.009>

PROFIL PENULIS



Darwis, S.E., M.A.P

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial & Hukum Universitas Negeri Makassar. Penulis lahir di Tamanroya tanggal 05 Maret 1992. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Manajemen, Konsentrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar dan melanjutkan S2 Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta. Penulis pernah aktif sebagai tenaga ahli Anggota DPR RI (2018-2024) dalam tugas-tugas pendampingan penyerapan aspirasi, sosialisasi program dan kebijakan di bidang Kesehatan, tenaga kerja dan kependudukan Komisi IX DPR RI. Saat ini aktif sebagai peneliti dan penulis dalam bidang perencanaan kebijakan dan keuangan publik serta menjalankan tugas sebagai dosen dalam bidang kebijakan publik di Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H), Universitas Negeri Makassar (UNM) sejak tahun 2025. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: darwis@unm.ac.id

BAB 7

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DALAM GOVERNANSI DIGITAL

Muhammad Hidayat L, S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Makassar

A. KONSEP INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DALAM GOVERNANSI DIGITAL

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara pemerintah menjalankan administrasi, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan. Jika sebelumnya proses birokrasi lebih banyak dilakukan secara manual dengan dokumen fisik, saat ini berbagai aktivitas pemerintahan mulai beralih ke sistem digital. Transformasi ini bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Di Indonesia, transformasi tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong instansi pemerintah mengintegrasikan proses bisnis, layanan, dan pengelolaan data dengan memanfaatkan teknologi informasi. Namun, keberhasilan pemerintahan digital tidak hanya ditentukan oleh aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur

DAFTAR PUSTAKA

- Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). *Computer networking: A top-down approach* (8th ed.). Pearson.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Pearson.
- Mell, P., & Grance, T. (2011). *The NIST definition of cloud computing* (NIST Special Publication 800-145). National Institute of Standards and Technology. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-145.
- National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0* (NIST Cybersecurity White Paper 29). National Institute of Standards and Technology. DOI: 10.6028/NIST.CSWP.29.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). *Recommendation of the Council on Digital Government Strategies*. OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/0406.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
- Republik Indonesia. (2019a). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112.
- Republik Indonesia. (2019b). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

- Republik Indonesia. (2022a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Republik Indonesia. (2022b). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159.
- Rose, S., Borchert, O., Mitchell, S., & Connelly, S. (2020). *Zero trust architecture* (NIST Special Publication 800-207). National Institute of Standards and Technology. DOI: 10.6028/NIST.SP.800-207.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill.
- Stallings, W., & Brown, L. (2018). *Computer security: Principles and practice* (4th ed.). Pearson.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). *United Nations E-Government Survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development*. United Nations.
- World Bank. (2022). *GovTech Maturity Index, 2022 update: Trends in public sector digital transformation*. World Bank.

PROFIL PENULIS



Muhammad Hidayat L., S.Pd., M.Pd. Penulis lahir di Pangkajene Sidenreng pada 27 Maret 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis meraih gelar magister pada Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Negeri Makassar pada tahun 2019. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Bidang keilmuan dan kajian yang ditekuni penulis berkaitan dengan teknologi informasi, pendidikan teknologi dan kejuruan, pengembangan media pembelajaran, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Beberapa karya ilmiah penulis telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran, serta jurnal internasional yang membahas penggunaan kecerdasan buatan di sektor pendidikan. Daftar karya ilmiah penulis dapat ditelusuri melalui SINTA ID: 6874275. email: muhammad.hidayat@unm.ac.id.

BAB 8

BIG DATA, *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*, DAN KEAMANAN DATA DALAM PEMERINTAHAN DIGITAL

Muhammad Hidayat L., S.Pd., M.Pd.
Universitas Negeri Makassar

A. KONSEP BIG DATA DAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM PEMERINTAHAN DIGITAL

Perkembangan pemerintahan digital menempatkan data sebagai aset penting dalam penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik. Pada masa sebelumnya, data lebih sering dipandang sebagai arsip administratif. Namun, dalam era digital, data telah menjadi sumber daya strategis yang dapat digunakan untuk memahami kebutuhan masyarakat, merancang kebijakan, mengawasi program, dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Setiap aktivitas pemerintahan, seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, bantuan sosial, perpajakan, dan pengaduan masyarakat, menghasilkan data dalam jumlah besar dan beragam. Data tersebut dapat berbentuk angka, dokumen, transaksi digital, lokasi, gambar, suara, teks pengaduan, unggahan media sosial, maupun pola interaksi masyarakat dengan layanan digital pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup hanya memiliki data, tetapi juga harus

DAFTAR PUSTAKA

- Dener, C., Nii-Aponsah, H., Ghunney, L. E., & Johns, K. D. (2022). *GovTech Maturity Index, 2022 update: Trends in public sector digital transformation*. World Bank.
- Few, S. (2013). *Information dashboard design: Displaying data for at-a-glance monitoring* (2nd ed.). Analytics Press.
- Géron, A. (2022). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems* (3rd ed.). O'Reilly Media.
- International Organization for Standardization. (2022). *ISO/IEC 27001:2022 Information security, cybersecurity and privacy protection—Information security management systems—Requirements*. ISO.
- International Organization for Standardization. (2023). *ISO/IEC 23894:2023 Information technology—Artificial intelligence—Guidance on risk management*. ISO.
- Kimball, R., & Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3rd ed.). Wiley.
- National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial intelligence risk management framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). U.S. Department of Commerce.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*. OECD Legal Instruments, OECD/LEGAL/0449.
- Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media.

- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2024). *United Nations E-Government Survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development*. United Nations.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2022). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO.

PROFIL PENULIS



Muhammad Hidayat L., S.Pd., M.Pd. Penulis lahir di Pangkajene Sidenreng pada 27 Maret 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana pada Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis meraih gelar magister pada Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas

Negeri Makassar pada tahun 2019. Saat ini, penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Bidang keilmuan dan kajian yang ditekuni penulis berkaitan dengan teknologi informasi, pendidikan teknologi dan kejuruan, pengembangan media pembelajaran, serta pemanfaatan kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan. Beberapa karya ilmiah penulis telah dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan media pembelajaran, serta jurnal internasional yang membahas penggunaan kecerdasan buatan di sektor pendidikan. Daftar karya ilmiah penulis dapat ditelusuri melalui SINTA ID: 6874275. email: muhammad.hidayat@unm.ac.id.

BAB 9

MODEL BISNIS LAYANAN PUBLIK DIGITAL DAN *PUBLIC VALUE* *CREATION*

Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P

Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah paradigma penyelenggaraan layanan publik dari pendekatan yang berorientasi pada prosedur administratif menjadi pelayanan yang berorientasi pada penciptaan nilai bagi masyarakat (*public value*). Teknologi digital tidak lagi dipandang sekadar sebagai alat pendukung administrasi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses bisnis, memperluas akses pelayanan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Perubahan tersebut mendorong organisasi sektor publik mengembangkan model bisnis yang mampu mengintegrasikan inovasi, kolaborasi, dan tata kelola digital dalam penyelenggaraan pelayanan (Osterwalder & Pigneur, 2010).

Berbeda dengan sektor privat yang berorientasi pada keuntungan, model bisnis sektor publik diarahkan untuk menciptakan manfaat bagi masyarakat melalui pelayanan yang efektif, efisien, inklusif, dan berkelanjutan (Moore, 1995). Oleh karena itu, keberhasilan organisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Alford, J. (2009). *Engaging public sector clients: From service delivery to co-production*. Palgrave Macmillan.
- Ansell, C., & Torfing, J. (2014). *Public innovation through collaboration and design*. Routledge.
- Argyris, C., & Schön, D. A. (1996). *Organizational learning II: Theory, method, and practice*. Addison-Wesley.
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2017). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 77(5), 640–654. <https://doi.org/10.1111/puar.12754>
- Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: Opportunities and barriers. *Long Range Planning*, 43(2–3), 354–363. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.010>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2019). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Hammer, M. (1990). Reengineering work: Don't automate, obliterate. *Harvard Business Review*, 68(4), 104–112.
- Hodge, G. A., & Greve, C. (2017). On public–private partnership performance: A contemporary review. *Public Works Management & Policy*, 22(1), 55–78. <https://doi.org/10.1177/1087724X16657830>
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- OECD. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Publishing.

- OECD. (2023). *Digital Government Index 2023: Results and key findings*. OECD Publishing.
- Osborne, S. P. (2018). From public service-dominant logic to public service logic: Are public service organizations capable of co-production and value co-creation? *Public Management Review*, 20(2), 225–231. <https://doi.org/10.1080/14719037.2017.1350461>
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A new theory for public service management? Toward a public service-dominant approach. *The American Review of Public Administration*, 43(2), 135–158. <https://doi.org/10.1177/0275074012466935>
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers*. John Wiley & Sons.
- United Nations. (2024). *United Nations e-government survey 2024: Accelerating digital transformation for sustainable development*. United Nations.
- World Bank. (2022). *GovTech maturity index 2022 update: Trends in public sector digital transformation*. World Bank.

PROFIL PENULIS



Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P.

Penulis merupakan dosen pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV (D4) Program Studi Administrasi Bisnis di Politeknik Negeri Ujung Pandang dan pendidikan Magister (S2) Program Studi Administrasi Publik di Universitas Hasanuddin. Latar belakang pendidikan tersebut memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengembangkan kajian administrasi publik melalui pendekatan yang memadukan aspek administrasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan. Fokus kajian penulis meliputi administrasi publik, tata kelola pemerintahan (*public governance*), kebijakan publik, pelayanan publik, pemerintahan daerah, manajemen sektor publik, inovasi sektor publik, dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kajian yang dilakukan berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan inovasi sektor publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagai akademisi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga secara konsisten menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, serta menyusun buku ajar dan buku referensi sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

BAB 10

INOVASI, KEWIRAUSAHAAN PUBLIK, DAN EKOSISTEM DIGITAL SEKTOR PUBLIK

Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Organisasi sektor publik dituntut tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai alat administrasi, tetapi juga mengembangkan inovasi yang mampu meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses kerja, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, inovasi menjadi elemen strategis yang mendukung terwujudnya pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada *public value* (OECD, 2023).

Transformasi digital juga mengubah peran aparatur pemerintah. Aparatur tidak lagi hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi dituntut memiliki jiwa kewirausahaan (*public entrepreneurship*), yaitu kemampuan mengenali peluang, menciptakan solusi inovatif, serta mengelola perubahan dalam organisasi publik. Kemampuan tersebut penting untuk menjawab berbagai tantangan pelayanan yang semakin

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Torfing, J. (2014). *Public innovation through collaboration and design*. Routledge.
- Bason, C. (2018). *Leading public sector innovation: Co-creating for a better society* (2nd ed.). Policy Press.
- Bernier, L., & Hafsi, T. (2007). The changing nature of public entrepreneurship. *Public Administration Review*, 67(3), 488–503. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00747.x>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2017). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the New Public Management. *Public Administration Review*, 77(5), 640–654. <https://doi.org/10.1111/puar.12754>
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2019). *The new public service: Serving, not steering* (4th ed.). Routledge.
- Moore, M. H. (1995). *Creating public value: Strategic management in government*. Harvard University Press.
- OECD. (2023). *Digital Government Index 2023: Results and key findings*. OECD Publishing.
- Osborne, S. P., & Brown, L. (2011). Innovation, public policy and public services delivery in the UK: The word that would be king? *Public Administration*, 89(4), 1335–1350.
- Osborne, S. P., Radnor, Z., & Nasi, G. (2013). A new theory for public service management? Toward a public service-dominant approach. *The American Review of Public Administration*, 43(2), 135–158. <https://doi.org/10.1177/0275074012466935>

World Bank. (2022). *GovTech Maturity Index 2022 update: Trends in public sector digital transformation*. World Bank.

PROFIL PENULIS



Dewi, S.Tr.A.B., M.A.P.

Penulis merupakan dosen pada Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan Diploma IV (D4) Program Studi Administrasi Bisnis di Politeknik

Negeri Ujung Pandang dan pendidikan Magister (S2) Program Studi Administrasi Publik di Universitas Hasanuddin. Latar belakang pendidikan tersebut memberikan perspektif yang komprehensif dalam mengembangkan kajian administrasi publik melalui pendekatan yang memadukan aspek administrasi, manajemen, dan tata kelola pemerintahan. Fokus kajian penulis meliputi administrasi publik, tata kelola pemerintahan (*public governance*), kebijakan publik, pelayanan publik, pemerintahan daerah, manajemen sektor publik, inovasi sektor publik, dan pemberdayaan masyarakat. Berbagai kajian yang dilakukan berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan inovasi sektor publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagai akademisi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis juga secara konsisten menghasilkan publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional, serta menyusun buku ajar dan buku referensi sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Transformasi digital telah mengubah cara pemerintah bekerja, mengambil keputusan, mengelola sumber daya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Digitalisasi birokrasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Buku Digitalisasi Birokrasi dan Pelayanan Publik menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai perubahan administrasi publik dalam menghadapi era digital. Buku ini menempatkan teknologi bukan sekadar sebagai alat untuk memindahkan pelayanan konvensional ke dalam platform elektronik, melainkan sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang menyentuh aspek kelembagaan, regulasi, kepemimpinan, sumber daya manusia, pengelolaan data, keuangan publik, hingga hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Pembahasan diawali dengan konsep dasar governansi digital dan transformasi pelayanan publik, kemudian dilanjutkan dengan reformasi birokrasi, penguatan kelembagaan, regulasi, dan kepemimpinan dalam ekosistem pemerintahan digital. Buku ini juga mengulas digitalisasi keuangan publik, transparansi fiskal, akuntabilitas anggaran, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan keuangan negara.

Lebih jauh, pembaca diperkenalkan pada berbagai isu strategis masa kini dan masa depan, seperti infrastruktur teknologi informasi, interoperabilitas sistem, keamanan siber, Big Data, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, perlindungan data pribadi, serta etika pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan. Pembahasan kemudian diperluas pada inovasi model layanan publik digital, penciptaan public value, kemitraan publik-swasta, kewirausahaan publik, hingga perkembangan GovTech sebagai bagian dari ekosistem inovasi sektor publik.

Di tengah berbagai peluang tersebut, buku ini juga mengingatkan bahwa transformasi digital menghadirkan tantangan berupa kesenjangan digital, keterbatasan kompetensi aparatur, fragmentasi sistem, keamanan data, risiko teknologi, dan perlunya regulasi serta kepemimpinan yang adaptif.

Dengan pendekatan yang memadukan perspektif konseptual dan praktis, buku ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak ditentukan oleh seberapa banyak teknologi yang digunakan, tetapi oleh seberapa besar teknologi tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, dan menciptakan nilai publik secara berkelanjutan.

Buku ini layak menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, aparatur pemerintah, pengambil kebijakan, praktisi administrasi publik, serta siapa pun yang ingin memahami arah masa depan birokrasi dan pelayanan publik di era digital.



IKAPI
IKATAN JURNALIS INDONESIA

CV. Tahta Media Group

Sukoharjo, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.co.id

Ig : tahtamedia group

Telp/WA : +62 896 5427 3996

